

# Meningkatkan Partisipasi Pemilu melalui Literasi Politik Pemuda Milenial dalam Pendidikan Kewarganegaraan

Ilham Mahmud Farikiansyah<sup>1✉</sup>, Mila Nailis Salamah<sup>2</sup>, Annisa'ur Rokhimah<sup>3</sup>, Lailiyah Ma'rifah<sup>4</sup>,  
Firyal Nabila Faiqah Faruq<sup>5</sup>, Muhammad Afrizatifurrohman Al Gufron<sup>6</sup>  
(1,2,3,4,5,6) Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Indonesia

✉ Corresponding author  
[farikf104@gmail.com]

## Abstrak

Literasi politik adalah kemampuan memahami, menganalisis, dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, yang menjadi kunci peningkatan partisipasi pemuda dalam pemilihan umum (Pemilu). Pendidikan Kewarganegaraan berperan penting dalam menginternalisasi nilai-nilai demokrasi dan meningkatkan kesadaran politik generasi muda. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi strategi peningkatan literasi politik melalui Pendidikan Kewarganegaraan dengan menggunakan metode analisis literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi politik yang baik, didukung oleh pengajaran kontekstual dan integrasi teknologi, mampu meningkatkan kesadaran politik dan partisipasi aktif pemuda. Literasi digital juga berperan dalam memperluas akses informasi politik yang valid serta melatih kemampuan berpikir kritis. Pendekatan seperti konstruktivisme, refleksi, dan komunitas belajar terbukti efektif dalam membentuk pemilih yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan dapat menjadi instrumen strategis untuk memperkuat literasi politik pemuda milenial, sehingga mendukung demokrasi yang inklusif dan berkelanjutan. Penelitian ini merekomendasikan pengembangan kurikulum adaptif serta pemanfaatan teknologi untuk membangun generasi muda yang berperan sebagai agen perubahan dalam pembangunan bangsa.

**Kata Kunci:** *Literasi Politik, Pendidikan Kewarganegaraan, Pemuda Milenial, Partisipasi Politik, Literasi Digital, Demokrasi.*

## Abstract

Political literacy is the ability to understand, analyse and participate in political activities, which is key to increasing youth participation in elections. Civic Education plays an important role in internalising democratic values and increasing young people's political awareness. This research aims to explore strategies to improve political literacy through Civic Education using the literature analysis method. The results show that good political literacy, supported by contextualised teaching and technology integration, can increase political awareness and active participation of youth. Digital literacy also plays a role in expanding access to valid political information and practising critical thinking skills. Approaches such as constructivism, reflection and learning communities have proven effective in shaping smart, critical and responsible voters. The conclusion of this study confirms that Civic Education can be a strategic instrument to strengthen the political literacy of millennial youth, thus supporting inclusive and sustainable democracy. This research recommends the development of an adaptive curriculum as well as the utilisation of technology to build a young generation that acts as agents of change in nation building.

**Keywords:** *Political Literacy, Civic Education, Millennial Youth, Political Participation, Digital Literacy, Democracy.*

## PENDAHULUAN

Penurunan partisipasi politik, terutama terkait pemilihan umum, telah menjadi perhatian utama dalam beberapa dekade terakhir di berbagai negara demokratis. Berdasarkan data dari *The Global State of Democracy 2021: Building Resilience in a Pandemic Era (2021)* menunjukkan penurunan yang konsisten dalam partisipasi ini. Pada tahun 1980-an, tingkat partisipasi pemilih di negara-negara demokratis umumnya mencapai 70-80%, menandakan tingginya keterlibatan masyarakat dalam urusan politik. Namun, dalam dua tahun terakhir, data menunjukkan penurunan terus menerus dalam partisipasi pemilih. Pada tahun 2020, tingkat partisipasi pemilih di negara-negara demokratis secara keseluruhan menurun menjadi sekitar 65-75%. Penurunan ini menandakan bahwa meskipun demokrasi tetap menjadi sistem politik yang dominan, keterlibatan aktif masyarakat dalam proses politik, terutama melalui pemilihan umum, mengalami penurunan. Salah satu faktor utamanya adalah kurangnya minat politik di kalangan generasi muda. Di Amerika Serikat,

data Youth Electoral Significance Index menunjukkan bahwa partisipasi pemilih dalam kelompok usia 18-29 tahun pada tahun 2019 hanya sebesar 36%, yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan kelompok usia 30-44 tahun (58%) dan 45-64 tahun (68%) (Circle, 2021). Fenomena ini mengindikasikan ketidakseimbangan partisipasi politik di antara kelompok usia, di mana generasi muda menunjukkan tingkat partisipasi yang lebih rendah dalam pemilihan umum dibandingkan dengan kelompok usia yang lebih tua di Amerika Serikat.

Secara serupa, di Indonesia, terjadi kecenderungan penurunan partisipasi politik, khususnya terkait pemilihan umum. Menurut data dari Subdirektorat Statistik Politik Keamanan (2019), partisipasi pemilih pada Pemilu 2019 hanya mencapai sekitar 80,1%, menurun dari angka pada Pemilu 2014 (85,1%) dan Pemilu 2009 (84,1%). Penurunan yang paling mencolok terjadi pada kelompok usia pemilih 17-40 tahun, atau generasi milenial, dengan tingkat partisipasi sekitar 40%, yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan partisipasi kelompok usia 41-55 tahun (75%) dan >55 tahun (85%). Kurangnya minat politik dari generasi milenial ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk ketidakpercayaan terhadap sistem politik, kurangnya pemahaman akan demokrasi (political literacy), serta adanya budaya apatisisme yang mulai berkembang di kalangan generasi milenial di perkotaan (Pahlevi et al., 2021).

Ketidakmampuan mengatasi tantangan terkait rendahnya partisipasi dalam pemilihan umum memiliki implikasi substansial terhadap stabilitas demokrasi dan kesejahteraan sosial secara menyeluruh. Tingkat partisipasi politik yang rendah memiliki potensi menghasilkan sejumlah dampak yang merugikan bagi masyarakat dan lembaga-lembaga demokratis. Absennya keterlibatan politik yang signifikan dapat berujung pada menurunnya legitimasi pemerintah dan representasi yang akurat terhadap kehendak rakyat, serta meningkatnya disparitas politik. Apabila hanya segelintir individu yang aktif dalam proses pemilihan umum, maka pandangan dan aspirasi mayoritas masyarakat tidak akan tercermin secara memadai. Hal ini berpotensi mereduksi legitimasi pemerintahan yang terpilih dan menghasilkan keputusan yang tidak mencerminkan kepentingan kolektif. Terlebih lagi, rendahnya partisipasi politik dapat mengakibatkan terjadinya ketidaksetaraan dan ketimpangan dalam kebijakan publik (Blais & Dobrzynska, 1998). Kelompok atau komunitas yang minim terlibat dalam urusan politik berisiko kehilangan akses dan pengaruh terhadap keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Ini berpotensi memperdalam kesenjangan sosial, ekonomi, dan politik dalam masyarakat. Norris (2011) menyoroti bahwa ketidakpuasan terhadap proses politik dapat merusak integritas demokrasi dengan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap institusi politik. Situasi ini berpotensi menciptakan lingkungan di mana segelintir kelompok masyarakat merasa tidak secara adil diwakili yang dapat memicu ketegangan sosial. Alhasil, dampak jangka panjang yang ditimbulkan dapat memunculkan potensi konflik politik yang lebih besar.

Dalam kondisi untuk menanggulangi dampak yang dihasilkan, Penelitian mengenai partisipasi dalam pemilihan umum, terutama pada segmen pemilih muda, menarik perhatian yang signifikan karena berkorelasi erat dengan kelangsungan dan mutu demokrasi suatu negara. Hoskins et al. (2008) mengemukakan bahwa tingkat partisipasi politik masyarakat menjadi salah satu penanda utama keberhasilan demokrasi, terutama partisipasi dari kelompok usia yang akan mempengaruhi kebijakan di masa mendatang. Rendahnya tingkat partisipasi politik dari generasi muda di sejumlah negara, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, memberikan petunjuk terhadap potensi penurunan kekuatan dasar demokrasi pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, peningkatan literasi dan partisipasi politik di kalangan generasi muda merupakan aspek yang krusial untuk diteliti demi menemukan solusi yang optimal, di antaranya melalui reformasi pendidikan kewarganegaraan yang lebih efisien (Print et al., 2002).

Beberapa solusi umum telah diusulkan untuk meningkatkan literasi politik generasi milenial dan memperkuat partisipasi mereka dalam pemilihan umum. Salah satu pendekatan utama adalah memperkuat kurikulum pendidikan kewarganegaraan di tingkat sekolah dan perguruan tinggi. Menurut Kahne dan Westheimer (2006), peningkatan pendidikan kewarganegaraan yang lebih terintegrasi, yang mencakup pemahaman yang lebih mendalam tentang prinsip-prinsip demokrasi, partisipasi aktif dalam masyarakat, serta keterampilan kritis dalam menganalisis isu-isu politik, dapat memberikan dasar yang lebih solid bagi generasi muda untuk terlibat dalam proses politik, termasuk dalam pemilihan umum. Dengan penguatan pendidikan kewarganegaraan, generasi muda dapat dibekali dengan pengetahuan yang lebih luas tentang prinsip-prinsip demokrasi, termasuk hak dan tanggung jawab sebagai warga negara, serta pemahaman akan pentingnya partisipasi dalam membangun masyarakat. Hal ini mendorong mereka untuk terlibat secara aktif dalam proses pemilihan umum dan aktivitas politik pada umumnya. Selain itu, pengembangan keterampilan berpikir kritis dan analitis melalui pendidikan kewarganegaraan akan mempersiapkan generasi muda untuk memahami isu-isu politik yang kompleks secara bijaksana dan kritis. Kemampuan ini penting untuk membantu mereka dalam menilai informasi, menganalisis argumen, serta membuat keputusan yang terinformasi dan bertanggung jawab dalam ranah politik.

Kemudian, Terlibat secara aktif melalui program-program non-formal seperti organisasi kepemudaan, kelompok sukarelawan, atau proyek-proyek sosial yang menghadirkan pengalaman praktis dalam berpartisipasi dalam kegiatan politik, merupakan alternatif yang efektif. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Finlay et al. (2010), pengalaman langsung ini memiliki peran penting dalam membangun keterlibatan

politik yang berkelanjutan di kalangan pemuda. Selain itu, pemanfaatan media sosial dan teknologi informasi juga merupakan solusi yang efektif dalam meningkatkan literasi politik generasi muda. Astuti (2019) menekankan bahwa penggunaan media sosial untuk menyebarkan informasi politik yang tepat dan mendidik, serta memfasilitasi diskusi serta perdebatan yang sehat mengenai isu-isu politik, dapat membantu meningkatkan kesadaran politik di kalangan pemuda milenial.

Dalam konteks meningkatkan partisipasi pemilihan umum, salah satu solusi alternatif yang diperkenalkan adalah pengembangan Literasi Politik Pemuda Milenial melalui Pendidikan Kewarganegaraan. Literasi politik dianggap sebagai elemen kunci dalam opsi solusi yang diajukan. Fokus pada literasi politik pemuda milenial melalui pendidikan kewarganegaraan dianggap sebagai strategi yang paling tepat dan esensial. Alasan utama untuk memilih pendidikan kewarganegaraan sebagai solusi yang paling signifikan adalah karena pemuda milenial merupakan mayoritas populasi di banyak negara saat ini dan akan menjadi pemimpin di masa depan dalam jangka waktu yang panjang. Studi yang dilakukan oleh Torney-Purta et al. (2001) menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan yang berbasis partisipatif terbukti paling berhasil dalam membentuk sikap serta perilaku politik yang positif pada kelompok usia yang produktif ini jika dibandingkan dengan berbagai jenis intervensi lainnya. Selain itu, meningkatkan literasi politik melalui pendidikan formal di lembaga pendidikan seperti sekolah terbukti mampu menjangkau serta meratakan dampaknya pada populasi pemuda secara luas, sebagaimana disorot dalam penelitian oleh Jennings et al. (2009). Karenanya, reformasi dalam pendidikan kewarganegaraan dianggap sebagai solusi paling strategis dan berkelanjutan untuk meningkatkan literasi serta partisipasi politik generasi muda, baik pada saat ini maupun di masa mendatang.

Peningkatan Literasi Politik Pemuda Milenial melalui Pendidikan Kewarganegaraan menampilkan keunggulan serta manfaat yang signifikan dalam meningkatkan partisipasi pemilihan umum dan memiliki relevansi yang kuat dalam membentuk keterlibatan politik pemuda. Pendekatan terstruktur yang ditawarkan oleh pendidikan kewarganegaraan menonjol sebagai aspek unggulan, menyediakan kerangka kerja yang terencana untuk memperdalam pemahaman politik. Sebagai salah satu bagian integral dari kurikulum sekolah, bahkan di lingkungan universitas, pendidikan kewarganegaraan memiliki jangkauan yang luas sehingga intervensi melalui kurikulum ini, termasuk dalam memperkaya pemahaman politik, dapat mencakup populasi pemuda secara menyeluruh (Tolo, 1999). Pendidikan kewarganegaraan fokus pada membangun kesadaran dan partisipasi politik siswa, sehingga menjadi sasaran yang tepat dalam mencapai tujuan peningkatan literasi dan aktivisme politik (Quintelier, 2010). Seiring berjalannya waktu, pemuda milenial mampu mengembangkan sikap kritis, menggali berbagai perspektif mengenai isu-isu politik, dan memperkuat partisipasi mereka dalam pemilihan umum sebagai ekspresi dari pemahaman yang lebih dalam mengenai pentingnya keterlibatan politik. Terdapat hubungan erat antara pendidikan kewarganegaraan di masa muda dengan tingkat partisipasi politik di masa dewasa menurut hasil penelitian (Neundorf et al., 2013). Dengan fokus pada Literasi Politik melalui pendidikan kewarganegaraan, kebutuhan akan pemahaman yang lebih baik tentang proses politik dan partisipasi yang lebih aktif dalam pemilihan umum dapat terpenuhi, mempengaruhi pikiran untuk terlibat lebih aktif dalam ranah politik di masa dewasa.

Penelitian ini menawarkan kontribusi baru dengan menekankan kebutuhan akan pendekatan empiris yang lebih substansial di konteks Indonesia. Penelitian empiris yang khusus mengeksplorasi efektivitas pendidikan kewarganegaraan dalam meningkatkan partisipasi politik, khususnya dalam kegiatan pemilihan umum, masih terbatas di Indonesia, terutama pada kelompok pemilih pemula dan pemuda milenial. Keadaan ini menjadi penting karena terdapat kecenderungan penurunan signifikan dalam partisipasi politik, khususnya dalam pemilihan umum, di kalangan usia muda. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk menilai langkah-langkah yang dilakukan terkait reformasi kurikulum pendidikan kewarganegaraan yang lebih terarah dan praktis. Hal ini diharapkan mampu menjadi solusi efektif dalam meningkatkan efikasi politik dan keinginan untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum di kalangan pemilih pemula dan pemuda milenial di Indonesia ke depannya.

Penelitian mengenai efektivitas pendidikan kewarganegaraan untuk meningkatkan tingkat literasi dan partisipasi politik di kalangan generasi muda merupakan sebuah kebutuhan mendesak, terutama mengingat tren penurunan partisipasi pemilih, terutama di antara kelompok usia muda, dari satu pemilihan umum ke pemilihan umum berikutnya di Indonesia. Rendahnya tingkat partisipasi politik dari kelompok mayoritas ini menandakan potensi melemahnya pondasi demokrasi di Indonesia dalam waktu yang akan datang (Hutter, 2008). Oleh karena itu, masa depan demokrasi serta kualitas kepemimpinan politik di negara ini dapat dipertahankan melalui upaya untuk meningkatkan efikasi politik dan kebiasaan berpartisipasi dalam pemilihan umum dari kelompok mayoritas, khususnya pemuda milenial, melalui implementasi pendidikan kewarganegaraan yang efektif.

Mengingat pentingnya permasalahan yang diuraikan, tujuan penelitian ini difokuskan pada pemahaman yang komprehensif tentang hubungan yang rumit antara literasi politik pemuda, penerapan pendidikan kewarganegaraan, dan tingkat partisipasi mereka dalam pemilihan umum, dimana faktor literasi politik yang rendah di kalangan pemuda milenial menjadi latar belakang penting dalam konteks ini.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan suatu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan tulisan berdasarkan telaah literatur yang sudah ada. Metode ini melibatkan pengumpulan data yang bersumber dari berbagai dokumen, seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, laporan hasil penelitian sebelumnya, serta sumber-sumber lain seperti makalah, majalah, dan situs web (Guntoro, 2021). Dengan asumsi bahwa peneliti telah mengumpulkan literatur yang relevan, materi ini kemudian dikaji secara sistematis untuk digunakan dalam penelitian. Dalam prosesnya, studi kepustakaan melibatkan langkah umum, seperti merumuskan hipotesis secara metodis, menelusuri literatur, dan menganalisis laporan yang mengandung data yang berkaitan dengan fokus penelitian. Studi kepustakaan menjadi langkah penting setelah peneliti menetapkan fokus penelitian, hipotesis, dan topik yang akan dieksplorasi. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menyusun kerangka teori yang relevan dan mendalam, yang mendukung tujuan penelitian.

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini digunakan untuk memahami dan menganalisis secara mendalam fenomena, praktik sosial, pandangan, dan pola pemikiran yang berkaitan dengan partisipasi pemuda milenial dalam pemilihan umum. Melalui penggambaran ini, penelitian kualitatif bertujuan untuk menemukan pola dan klarifikasi guna menarik kesimpulan yang relevan (Guntoro, 2021).

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi. Data yang dikumpulkan meliputi berbagai jenis dokumen, seperti buku, artikel ilmiah, jurnal, dan laporan penelitian lainnya (Arikunto, 2010). Adapun proses pengumpulan data dilaksanakan secara sistematis sebagai berikut :

### 1. Pengumpulan Data

Data yang relevan dengan fokus penelitian dikumpulkan terlebih dahulu dari berbagai sumber. Peneliti memastikan bahwa data yang diperoleh memiliki kelengkapan, kejelasan, dan relevansi dengan topik penelitian. Proses ini melibatkan pencarian literatur menggunakan kata kunci tertentu dalam database akademik, perpustakaan, dan situs web terpercaya.

### 2. Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul disusun kembali sesuai dengan kategori yang relevan dengan fokus penelitian. Kategorisasi dilakukan untuk menyusun struktur data yang mempermudah analisis. Proses ini memastikan bahwa data terorganisir dengan baik untuk mendukung interpretasi yang mendalam.

### 3. Penafsiran Data

Pada tahap ini, data dianalisis menggunakan teknik analisis kritis. Teknik ini mempertimbangkan nilai-nilai dan pandangan tertentu yang mendasari penelitian, sehingga menghasilkan interpretasi yang komprehensif. Peneliti menelaah secara mendalam berbagai sumber, seperti jurnal, tesis, skripsi, dan buku, untuk mengidentifikasi teori yang mendukung penelitian. Data yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan fenomena yang terjadi di lapangan untuk menarik kesimpulan (Burhanuddin, 2022).

Melalui pendekatan analisis kritis, peneliti tidak hanya memahami data sebagai fakta yang statis, tetapi juga menghubungkannya dengan nilai-nilai yang ada dalam konteks penelitian. Teknik ini memberikan kerangka berpikir yang holistik untuk mengeksplorasi keterkaitan antara literasi politik pemuda milenial dan partisipasi mereka dalam pemilihan umum (Andriyany, 2021). Studi kepustakaan dalam penelitian ini berperan penting dalam mengidentifikasi konsep-konsep utama, teori-teori pendukung, dan pandangan dari berbagai sumber yang relevan. Hasilnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman mengenai pentingnya literasi politik dalam meningkatkan partisipasi pemilu di kalangan pemuda milenial.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia, sebagai negara demokrasi terbesar keempat di dunia setelah India, China, dan Amerika Serikat, memiliki populasi sekitar 273,5 juta jiwa pada tahun 2022 (Worldometers, 2023). Sistem pemilihan umum (pemilu) di Indonesia diatur untuk diadakan setiap 5 tahun. Pemilu ini bertujuan guna menentukan pilihan Presiden, Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Di Indonesia, pemilu terakhir dilaksanakan pada tahun 2019. Pada pemilu kala itu, terdapat catatan bahwa 192,8 juta atau sekitar 80,06% dari total 240,8 juta pemilih terdaftar turut serta menggunakan hak pilihnya (Komisi Pemilihan Umum (KPU), 2019).

Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 dalam publikasi Pemerintah Indonesia (2017), pemilihan umum (pemilu) berikutnya akan kembali diselenggarakan pada bulan Februari 2024 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029. Sementara itu, pemilihan umum legislatif dijadwalkan pada bulan April 2024 untuk mengisi kursi DPR, DPD, dan DPRD untuk periode 2024-2029 (Komisi Pemilihan Umum (KPU), 2023). Tingkat partisipasi pemilih pada pemilu 2019 cukup tinggi, sehingga Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) melakukan sosialisasi dan menargetkan partisipasi pemilih pada pemilu 2024 dapat mencapai 85-90% atau sekitar 190-200 juta dari perkiraan 221 juta daftar pemilih saat itu (Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo), 2023). Oleh karena itu, untuk mewujudkan target

tersebut, partisipasi pemilu dari berbagai segmen masyarakat, terutama di kalangan pemuda milenial, menjadi kebutuhan yang esensial dan krusial.

Partisipasi pemilu sering diidentifikasi sebagai bentuk partisipasi politik yang dilakukan oleh warga negara. Partisipasi politik mengacu pada aktivitas individu atau kelompok yang terlibat dalam ranah politik secara bersama-sama, terutama melalui proses pemilihan pemimpin dan perwakilan negara, serta memiliki pengaruh terhadap kebijakan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Aksi-aksi tertentu termasuk dalam kerangka aktivitas ini, seperti memberikan suara saat pemilu, menghadiri pertemuan umum, memegang peran penting dalam partai politik atau organisasi, dan menjalin komunikasi dengan perwakilan pemerintah atau anggota parlemen (Budiarjo, 1982).

Terdapat dua bentuk partisipasi politik, yakni partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Keterlibatan yang aktif dari pemuda milenial dalam proses pemilihan umum berpotensi untuk meluaskan representasi beragam segmen masyarakat di dalam panggung politik (Kariuki et al., 2021). Di sisi lain, partisipasi pasif mengacu pada perilaku yang patuh terhadap figur otoritas, di mana individu menerima dan menaati keputusan yang diperintahkan oleh pemerintah. Dengan partisipasi yang lebih intensif dan aktif dari pemuda milenial dalam pemilu, bukan hanya akan meningkatkan validitas politik, melainkan juga akan mengenalkan variasi sudut pandang yang beragam dalam proses perumusan kebijakan publik (Proffitt, 2014). Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan peningkatan partisipasi pemilih yang diharapkan, menjadi sangat penting untuk mendorong serta memberikan dukungan yang substansial terhadap keterlibatan aktif pemuda milenial dalam proses pemilihan umum. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat fondasi demokrasi (Walker, 2015).

**Tabel. 1 Jumlah Penduduk berdasarkan Rentang Generasi**

NO.	KATEGORI	USIA	JUMLAH
1.	Post Generasi Z	<11 tahun	35.320.089
2.	Generasi Z	11 - 26 tahun	71.509.082
3.	Milenial	27 - 42 tahun	69.699.972
4.	Generasi X	43 - 58 tahun	56.557.299
5.	Boomer	59 - 68 tahun	32.492.975
6.	Pre Boomer	69 - 77 tahun	4.624.500

Sumber : Badan Pusat Statistik (2020)

Berdasarkan data yang telah dipaparkan sebelumnya, peran Generasi Z dan Generasi Milenial sebagai konstituen pemilih dalam pemilihan umum kedepannya diprediksi akan memberikan dampak yang sangat signifikan. Penelitian ini akan memfokuskan kajiannya pada Generasi Milenial sebagai salah satu segmen generasi muda yang jumlahnya cukup besar dan diyakini akan ikut menentukan hasil pemilihan umum.

Diketahui bahwa pemilihan umum (Pemilu) ini selayaknya proses demokratis yang memberikan kesempatan bagi penentuan perubahan dalam struktur pemerintahan. Sama halnya dalam pandangan menurut Ubaedillah (2016), Pemilu merupakan forum di mana warga negara memiliki kewenangan untuk memilih wakil-wakil mereka di parlemen serta pemimpin di tingkat nasional maupun daerah. Pelaksanaannya dilakukan secara langsung, terbuka dalam pandangan parlemen, dan dijalankan dengan prinsip kebebasan, kerahasiaan, kejujuran, keadilan, serta keamanan.

Sebagai generasi pemuda milenial, yang sering teridentifikasi dengan kecenderungan memiliki pemahaman yang mendalam akan signifikansi pendidikan, cenderung menggunakan pengetahuan mereka untuk mengevaluasi kebijakan politik yang diajukan oleh calon dalam pemilihan umum. Mereka melakukan evaluasi yang komprehensif terhadap berbagai isu yang terjadi.

Penelitian terdahulu telah menunjukkan bahwa para pemilih, termasuk generasi milenial, umumnya cenderung melakukan eksplorasi informasi yang lebih luas sebelum mereka membuat keputusan terkait preferensi politik mereka (Priwati et al., 2020). Pemuda milenial secara khusus cenderung melakukan analisis yang cermat terkait calon yang mereka pilih dalam pemilihan umum dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang komprehensif. Mereka terlibat dalam evaluasi yang mendalam terhadap latar belakang, catatan kinerja, serta visi dan misi dari tiap kandidat yang bersaing dalam kontestasi pemilu. Kebijakan ini mencerminkan kecenderungan yang ditemukan dalam generasi milenial, yaitu keinginan untuk menyusun preferensi politik mereka berdasarkan pemahaman yang mendalam terhadap isu-isu yang menjadi fokus dari masing-masing calon. Menurut penelitian oleh Haris Zulkarnain dan Saufi (2021), faktor-faktor yang memengaruhi pemilih, termasuk generasi milenial, dalam menetapkan preferensi politiknya dapat dijelaskan melalui beberapa faktor determinan yang memengaruhi pertimbangan mereka. Tiga faktor utama yang menjadi pertimbangan tersebut, diantaranya :

### **Karakteristik Intrinsik Individu**

Teori-teori dalam psikologi politik, seperti teori keadilan sosial dalam penelitian Jost dan Kay (2010) mengemukakan bahwa karakteristik individu seperti nilai-nilai, keyakinan, dan identitas politik berperan dalam penentuan pilihan politik seseorang. Terdapat variasi kemampuan tiap individu dalam memahami dan menganalisis informasi politik, dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pengalaman, latar belakang pendidikan, kondisi perekonomian, dan status sosial masing-masing. Perbedaan latar belakang individu tersebut secara substantif akan mempengaruhi proses pengambilan keputusan politik individu yang bersangkutan.

### **Media Massa**

Media massa memiliki peran yang signifikan dalam membentuk opini publik serta memengaruhi keputusan yang diambil oleh para pemilih. Teori agenda setting, yang diprakarsai oleh Bryant dan Oliver (2009), menyoroti bahwa media massa memiliki kemampuan untuk menetapkan topik dan isu yang menjadi fokus utama bagi masyarakat. Data yang berasal dari seminar dan survei, bersama dengan pandangan para ahli dan tokoh yang disampaikan melalui media serta melalui iklan politik, menjadi faktor yang mempengaruhi pertimbangan pemilih ketika mereka membuat pilihan politiknya. Selain itu, perhatian juga diberikan oleh pemilih terhadap perkembangan isu-isu aktual dan berita yang berkaitan dengan kinerja serta platform dari berbagai partai politik. Meskipun tingkat pemahaman dan pengetahuan pemilih terhadap informasi tersebut bervariasi, mereka tetap memperhatikan informasi tersebut dalam menyusun preferensi politik mereka.

### **Partai Politik**

Partai politik memiliki peran sentral dalam menarik perhatian pemilih melalui kesesuaian dengan preferensi serta pendekatan yang dekat dengan mereka. Teori partai politik oleh Downs (1957) menunjukkan bahwa partai politik cenderung menyelaraskan kebijakan mereka dengan preferensi pemilih guna memperoleh dukungan yang lebih besar selama proses pemilihan. Pemilih secara seksama mengevaluasi latar belakang, ideologi, dan profil politisi, juga menilai kualitas mereka secara pribadi. Kemampuan tokoh-tokoh partai politik untuk berkomunikasi secara efektif dengan masyarakat, terutama generasi muda, menjadi faktor krusial dalam membentuk citra positif dan reputasi baik partai politik tersebut di mata pemilih.

Berdasarkan faktor-faktor yang telah dipaparkan, pendidikan sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas dan kapabilitas individu di kalangan pemuda dipandang memiliki peran sentral dalam memperkaya pemahaman mereka mengenai dinamika politik, sehingga mendorong partisipasi yang lebih aktif dan kritis dalam proses pemilihan umum serta politik secara luas. Melalui pendidikan, pengetahuan terkait dinamika politik dapat ditingkatkan sehingga melahirkan pemuda yang lebih kritis dan vokal dalam menyalurkan hak suara atau hak pilih (vote) mereka pada pemilu maupun kebijakan publik (Galston, 2001). Hal tersebut selaras dengan konsep literasi politik dalam pendidikan yang dikemukakan oleh (Bochel, 2009) yang menekankan bahwa pendidikan memainkan peran signifikan dalam meningkatkan pemahaman pemuda terhadap struktur politik, kebijakan publik, dan mekanisme demokrasi suatu negara.

Sebagai upaya untuk menanamkan literasi politik pada generasi muda, diperlukan peningkatan intensitas pendidikan kewarganegaraan. Langkah ini memiliki potensi dalam meningkatkan kesadaran serta keterlibatan pemilih muda pada tahap-tahap penting dalam proses politik yang lebih mendalam, seperti dialog kebijakan, partisipasi dalam forum publik, serta upaya advokasi untuk perubahan peraturan (Napitupulu & Sagala, 2019).

Pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada generasi muda agar dapat terlibat dalam aktivitas politik dan kewarganegaraan (Kymlicka & Norman, 2000). Pendidikan ini melibatkan berbagai bentuk kegiatan, mulai dari partisipasi dalam kegiatan sukarela di masyarakat sipil, diskusi serta pembahasan mengenai masalah-masalah yang bersifat publik, hingga keterlibatan aktif dalam proses demokrasi elektoral seperti melalui hak pilih dalam pemilihan umum dan referendum (Bowyer & Kahne, 2020). Dalam konteks ini, pendidikan kewarganegaraan menekankan pentingnya mendorong nilai-nilai demokratis, mengembangkan kemampuan berpikir kritis terhadap isu-isu yang bersifat publik, serta menggalakkan partisipasi yang aktif dalam proses pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan politik yang berdampak pada keseluruhan masyarakat.

Dalam penelitian terdahulu, Widiatmaka et al. (2022) menjelaskan bahwa esensi utama dari pendidikan kewarganegaraan adalah untuk membentuk individu dengan tingkat kecerdasan yang lebih tinggi, sehingga mereka dapat terlibat secara aktif dan produktif dalam kehidupan bersama sebagai anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Dalam situasi saat ini yang menuntut kehadiran demokrasi yang kuat, peran pendidikan kewarganegaraan menjadi sangat krusial karena memfasilitasi pengimplementasian nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar demokrasi dalam setting pendidikan, baik di ruang kelas maupun dalam konteks pembelajaran di perguruan tinggi. Ini memberikan ruang bagi penerapan nilai-nilai demokrasi secara nyata dalam proses belajar-mengajar.

Berdasarkan uraian sebelumnya, pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan memiliki ruang lingkup yang mencakup berbagai elemen penting yang relevan dengan literasi politik dan partisipasi pemilu di kalangan pemuda milenial. Menurut Sutisna (2017), elemen-elemen yang tercantum dalam pendidikan kewarganegaraan yang lebih kompleks dapat dirinci sebagai berikut :

### **Persatuan dan Kesatuan Bangsa**

Pendidikan Kewarganegaraan menjadi instrumen strategis untuk menanamkan nilai persatuan dalam konteks keberagaman Indonesia. Menurut Sutisna (2017), keberagaman budaya, agama, dan etnis di Indonesia membutuhkan pemahaman mendalam tentang solidaritas sosial. Literasi politik pemuda milenial tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga kesatuan bangsa tetapi juga sebagai modal dalam menghadapi ancaman disintegrasi akibat polarisasi politik. Dalam praktiknya, efektivitas pembelajaran ini tergantung pada bagaimana institusi pendidikan merancang kurikulum yang relevan dan inklusif. Tantangannya adalah menciptakan pengalaman pembelajaran yang tidak hanya teoritis tetapi juga aplikatif, seperti melalui simulasi konflik dan penyelesaian masalah berbasis keberagaman.

### **Peraturan, Norma, dan Hukum**

Pengetahuan mengenai aturan dan norma hukum adalah fondasi dalam menciptakan pemilih yang taat hukum. Dalam konteks pemilu, pemahaman ini penting untuk memastikan bahwa proses demokrasi berjalan secara transparan dan akuntabel. Literasi politik memungkinkan pemuda memahami mekanisme seperti daftar pemilih tetap (DPT), aturan kampanye, dan larangan politik uang. Meski demikian, tantangan muncul dalam penyampaian materi ini. Seringkali, siswa memahami hukum hanya sebagai "aturan tertulis" tanpa mampu menginternalisasi esensi dari aturan tersebut. Perlu pendekatan berbasis kasus (*case-based learning*) untuk membantu siswa melihat relevansi hukum dalam kehidupan sehari-hari, terutama terkait pelanggaran dalam pemilu.

### **Hak Asasi Manusia**

Hak asasi manusia (HAM) menjadi salah satu pilar utama dalam Pendidikan Kewarganegaraan. Dalam konteks pemilu, HAM menekankan hak untuk memilih dan dipilih sebagai bagian dari demokrasi. Literasi politik yang berbasis HAM tidak hanya mendorong partisipasi aktif tetapi juga memastikan bahwa pemuda memahami implikasi etis dari keputusan mereka. Tantangan utama adalah menghindari pendekatan yang terlalu normatif. Pembelajaran harus mampu menanamkan kesadaran kritis, misalnya dengan mengeksplorasi kasus-kasus pelanggaran HAM terkait pemilu, seperti diskriminasi berbasis gender atau minoritas dalam proses pencalonan. Hal ini akan memotivasi pemuda untuk mendukung inklusivitas politik.

### **Kebutuhan Warga Negara**

Pemilu sebagai sarana demokrasi memberikan peluang bagi warga negara untuk memastikan bahwa kebutuhan mereka diakomodasi dalam kebijakan publik. Literasi politik yang baik mendorong pemuda untuk memilih kandidat berdasarkan program kerja yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Dalam konteks ini, pemahaman tentang kebutuhan warga negara harus dilengkapi dengan kemampuan analisis terhadap program kerja kandidat. Tantangan yang dihadapi adalah rendahnya akses pemuda terhadap informasi kandidat yang obyektif. Oleh karena itu, pelatihan analisis kebijakan publik perlu dimasukkan ke dalam pembelajaran.

### **Konstitusi Negara**

Konstitusi negara adalah dokumen fundamental yang menjadi acuan dalam sistem politik dan demokrasi. Pemahaman konstitusi membantu pemuda untuk memahami hak dan kewajiban mereka, termasuk dalam menjaga integritas demokrasi melalui partisipasi dalam pemilu. Kendati demikian, pengajaran konstitusi sering kali hanya membahas pasal-pasal secara tekstual. Untuk meningkatkan pemahaman, diperlukan metode pembelajaran seperti simulasi sidang konstitusi atau debat yang berfokus pada relevansi konstitusi terhadap isu-isu kontemporer.

### **Politik**

Pemahaman tentang dinamika politik memberikan wawasan kepada pemuda mengenai pentingnya peran mereka dalam pengambilan keputusan publik. Literasi politik tidak hanya meningkatkan partisipasi tetapi juga membentuk pemilih yang kritis terhadap kandidat dan sistem politik yang ada. Namun, pembelajaran politik sering terjebak pada bias ideologi atau afiliasi tertentu. Oleh karena itu, penting untuk mengintegrasikan analisis berbasis data dan fakta untuk menghindari manipulasi informasi. Diskusi kelompok dan debat politik berbasis data dapat menjadi solusi untuk memperkaya wawasan pemuda.

## **Pancasila**

Nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dalam membentuk etika dan moral pemuda dalam berpolitik. Literasi politik yang berbasis Pancasila memastikan bahwa pemuda tetap menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan solidaritas dalam setiap tahap proses pemilu. Tantangan yang sering muncul adalah bagaimana membuat nilai-nilai Pancasila relevan dalam konteks modern. Pembelajaran harus mampu menghubungkan nilai-nilai ini dengan isu-isu seperti korupsi, polarisasi politik, dan ketimpangan sosial.

## **Globalisasi**

Globalisasi membawa pengaruh besar terhadap dinamika politik dan demokrasi di tingkat lokal dan internasional. Literasi politik membantu pemuda memahami hubungan antara kebijakan nasional dan isu global, seperti perubahan iklim, perdagangan bebas, dan migrasi. Meski demikian, globalisasi juga membawa risiko, seperti penyebaran informasi palsu (hoaks) yang dapat memengaruhi opini politik. Oleh karena itu, penting untuk mengajarkan keterampilan literasi digital sebagai bagian dari Pendidikan Kewarganegaraan.

Pendidikan Kewarganegaraan memiliki potensi besar sebagai kerangka kerja untuk meningkatkan pemahaman politik generasi milenial. Yuniarto (2020) menyatakan bahwa langkah-langkah implementasi berbasis pendekatan-pendekatan konstruktif mampu memberikan dampak positif bagi partisipasi pemilih muda dalam pemilihan umum. Pendekatan-pendekatan tersebut meliputi konstruktivisme, penemuan (inquiry), bertanya (questioning), komunitas belajar (learning community), pemodelan (modelling), refleksi (reflection), dan penilaian sebenarnya (authentic assessment). Masing-masing elemen ini dirancang untuk mendukung keterlibatan aktif dan mendalam dalam proses politik yang demokratis.

## **Pendekatan Konstruktivisme**

Pendekatan konstruktivisme memandang pembelajaran sebagai proses aktif di mana individu membangun pemahaman melalui interaksi dengan lingkungan dan pengalaman langsung. Dalam konteks pemilihan umum, pendekatan ini memungkinkan pemilih muda untuk memahami bahwa partisipasi politik tidak hanya sebatas memberikan suara, tetapi juga mencakup keterlibatan dalam proses politik secara lebih luas. Misalnya, memahami bagaimana keputusan kebijakan berdampak pada isu-isu sosial, seperti pengangguran atau perubahan iklim, memungkinkan pemilih untuk membuat pilihan berdasarkan nilai dan prioritas mereka sendiri. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa konstruktivisme juga menantang pola pikir pasif, di mana pemilih hanya menerima informasi dari pihak otoritatif, dan mengarahkan mereka untuk mengevaluasi secara kritis informasi tersebut melalui pengalaman pribadi dan diskusi kelompok.

## **Pendekatan Penemuan (Inquiry)**

Pendekatan penemuan berfokus pada eksplorasi mandiri, di mana individu didorong untuk menggali isu-isu politik melalui investigasi berbagai sudut pandang. Dalam konteks pemuda milenial, pendekatan ini relevan karena mendorong mereka untuk terlibat langsung dalam riset terhadap informasi yang berkaitan dengan calon pemimpin, kebijakan, dan implikasi politik. Penemuan ini juga memfasilitasi pengembangan keterampilan seperti berpikir kritis, menyaring informasi, dan memahami konteks yang lebih luas. Namun, pendekatan ini membutuhkan dukungan akses terhadap sumber informasi yang kredibel serta bimbingan agar tidak terjebak dalam bias atau informasi palsu. Dengan membangun kompetensi ini, pemilih muda dapat menjadi agen perubahan yang aktif, bukan sekadar peserta pasif dalam demokrasi.

## **Bertanya (Questioning)**

Proses bertanya melatih kemampuan untuk mengajukan pertanyaan kritis yang mendalam, terutama dalam menganalisis isu-isu politik dan demokrasi. Misalnya, pemuda diajak untuk bertanya tentang latar belakang kandidat, validitas data kampanye, atau implikasi kebijakan tertentu terhadap kelompok rentan. Bertanya tidak hanya memicu proses berpikir reflektif, tetapi juga menciptakan ruang untuk diskusi yang lebih substantif. Analisis menunjukkan bahwa kemampuan bertanya kritis menjadi dasar untuk membangun masyarakat yang partisipatif, di mana warga negara mampu mempertanyakan kebijakan publik dan menuntut akuntabilitas dari para pemimpin politik. Namun, keberhasilan pendekatan ini memerlukan budaya dialog terbuka dan akses terhadap data yang dapat diverifikasi.

## **Komunitas Belajar (Learning Community)**

Komunitas pembelajaran memungkinkan kolaborasi antarindividu untuk berbagi gagasan dan memperluas wawasan politik. Diskusi dalam komunitas ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga membangun keterampilan interpersonal, seperti mendengarkan aktif dan menghargai perbedaan pendapat. Sebagai contoh, diskusi kelompok tentang isu-isu politik terkini, seperti pemilu 2024, dapat memberikan konteks yang lebih kaya bagi pemuda dalam memahami dinamika politik lokal maupun global. Komunitas pembelajaran juga mengurangi risiko isolasi informasi, di mana individu hanya terpapar pada

perspektif yang sempit. Namun, efektivitasnya bergantung pada keberagaman anggota komunitas dan keterbukaan untuk menerima sudut pandang yang berbeda.

### **Pemodelan (Modelling)**

Pemodelan menekankan pentingnya contoh nyata dari perilaku positif dalam partisipasi politik. Peran dosen atau pendidik sangat penting dalam menunjukkan bagaimana partisipasi politik yang sehat dilakukan, seperti melalui analisis kritis terhadap visi kandidat atau partisipasi dalam diskusi kebijakan publik. Dengan memberikan contoh nyata, pemuda dapat memahami bahwa partisipasi politik bukan hanya tanggung jawab, tetapi juga hak yang dapat digunakan untuk memengaruhi arah kebijakan. Analisis menunjukkan bahwa pemodelan yang konsisten dapat membangun kepercayaan pemuda terhadap proses demokrasi dan mengurangi skeptisisme terhadap politik.

### **Refleksi (Reflection)**

Refleksi memberikan ruang bagi individu untuk mengevaluasi pemahaman dan keputusan politik mereka secara mendalam. Dalam konteks ini, pemuda diajak untuk memeriksa kembali apakah pilihan politik mereka mencerminkan nilai-nilai pribadi dan memiliki dampak positif bagi masyarakat. Proses refleksi ini memperkuat kesadaran kritis terhadap konsekuensi dari keputusan politik, seperti dampaknya pada kelompok marginal. Analisis menunjukkan bahwa refleksi membantu menciptakan pemilih yang lebih bijaksana dan bertanggung jawab. Namun, untuk memastikan proses refleksi yang efektif, diperlukan panduan yang jelas serta waktu yang memadai untuk merenung.

### **Penilaian Sebenarnya (Authentic Assessment)**

Penilaian sebenarnya mengintegrasikan pembelajaran dengan dampak nyata yang dirasakan masyarakat. Dalam konteks ini, pemuda tidak hanya dinilai berdasarkan pemahaman teoretis, tetapi juga bagaimana mereka menerapkan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, pemuda dapat diminta untuk menyusun proposal kebijakan berbasis data yang relevan dengan kebutuhan lokal atau menyelenggarakan forum diskusi untuk meningkatkan kesadaran politik di komunitas mereka. Analisis menunjukkan bahwa pendekatan ini memperkuat rasa tanggung jawab terhadap proses politik dan mendorong komitmen jangka panjang terhadap nilai-nilai demokrasi. Namun, keberhasilannya bergantung pada relevansi tugas yang diberikan dengan konteks sosial dan politik yang dihadapi pemuda.

Lebih lanjut, Nassa (2024) menegaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan harus menjadi wadah bagi pemuda milenial untuk menginternalisasi nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai ini meliputi pemahaman terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara, toleransi terhadap perbedaan, serta kemampuan untuk berkontribusi secara positif dalam masyarakat. Upaya ini selaras dengan visi Indonesia Emas 2045 yang menekankan pada peran generasi muda sebagai penggerak utama dalam membangun bangsa yang lebih inklusif dan berdaya saing global. Namun, penginternalisasian ini memerlukan pendekatan strategis yang tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, tetapi juga melibatkan afektif dan psikomotorik. Dengan demikian, Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya menjadi instrumen teoritis, tetapi juga praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Sebagai langkah konkret untuk merealisasikan penginternalisasian nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari, diperlukan pendekatan yang strategis dan holistik. Pendekatan ini mencakup berbagai aspek yang saling melengkapi, mulai dari optimalisasi pembelajaran formal di kelas, pemanfaatan perkembangan teknologi secara bijak, hingga penguatan peran aktif pemuda milenial dalam mendukung demokrasi. Ketiga aspek ini tidak hanya berdiri sendiri, tetapi saling bersinergi untuk menciptakan generasi muda yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara emosional dan berdaya secara sosial. Berikut ini adalah penjelasan lebih rinci mengenai masing-masing pendekatan tersebut :

### **Pembelajaran Formal di Kelas**

Pembelajaran formal di kelas menjadi landasan utama dalam menginternalisasi nilai-nilai demokrasi kepada pemuda. Dalam konteks Pendidikan Kewarganegaraan, pembelajaran formal berfokus pada pemahaman prinsip-prinsip dasar politik, hukum, dan hak asasi manusia. Metode pembelajaran yang sering diterapkan, seperti diskusi kelompok, simulasi pemilu, dan studi kasus, bertujuan untuk menjembatani teori dengan praktik. Efektivitas pembelajaran formal sangat bergantung pada kualitas kurikulum, kompetensi pendidik, dan metode pengajaran. Menurut Kirchoff (2017), keberhasilan pembelajaran formal juga ditentukan oleh relevansi materi yang diajarkan dengan isu-isu kontemporer. Misalnya, dengan membahas kasus-kasus nyata seperti dinamika politik di media sosial atau tantangan integritas pemilu. Namun, hambatan utama dalam pendekatan ini adalah kurangnya keterkaitan langsung antara teori di kelas dan praktik dalam kehidupan nyata. Oleh karena itu, pembelajaran harus dirancang lebih kontekstual dan aplikatif untuk meningkatkan daya tarik dan efektivitasnya.

### **Perkembangan Teknologi**

Teknologi memberikan peluang besar dalam memperluas akses terhadap informasi politik. Literasi digital menjadi bagian penting dalam Pendidikan Kewarganegaraan, memungkinkan mahasiswa untuk mengakses sumber informasi yang beragam, seperti jurnal akademik, berita daring, dan platform diskusi politik. Di satu sisi, teknologi dapat meningkatkan keterlibatan pemuda dalam isu-isu politik melalui media sosial. Namun, di sisi lain, teknologi juga menghadirkan tantangan berupa hoaks, bias politik, dan filter bubble yang dapat memengaruhi objektivitas pemuda dalam mengambil keputusan politik. Oleh karena itu, literasi digital tidak hanya sekadar kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga mencakup kemampuan kritis untuk mengevaluasi informasi. Menurut Yuliandari et al (2023), integrasi literasi digital ke dalam kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan menjadi langkah strategis untuk menghadapi tantangan ini, termasuk melalui penggunaan aplikasi analisis data sederhana untuk mengidentifikasi bias informasi.

### **Peran Aktif Pemuda Milenial**

Pemuda milenial memiliki peran sentral dalam mengimplementasikan nilai-nilai demokrasi, seperti partisipasi aktif dalam pemilu, advokasi kebijakan, dan pengawasan publik terhadap jalannya pemerintahan. Peran aktif ini sering kali diwujudkan melalui keterlibatan dalam organisasi kemasyarakatan, kegiatan advokasi, atau kampanye politik berbasis komunitas. Peran aktif pemuda sering kali dibatasi oleh kurangnya kesadaran politik dan minimnya akses terhadap pendidikan politik yang memadai. Namun, pemuda milenial juga menunjukkan potensi besar dalam memanfaatkan media sosial sebagai alat untuk menyuarakan opini dan memobilisasi massa. Kirchoff (2017) menyebutkan bahwa dengan pendekatan berbasis komunitas, pemuda dapat berkontribusi dalam membangun kesadaran kolektif dan mendorong perubahan sosial. Tantangan utama dalam pendekatan ini adalah memastikan bahwa partisipasi pemuda tidak hanya bersifat sporadis, tetapi juga berkelanjutan dan berbasis pada prinsip-prinsip demokrasi yang inklusif.

Pendidikan Kewarganegaraan dengan pendekatan variatif ini, jika diterapkan secara konsisten, memiliki potensi besar untuk menjadi instrumen kunci dalam meningkatkan partisipasi politik generasi milenial. Selain menciptakan pemilih yang lebih cerdas dan kritis, pendekatan ini juga mendukung terciptanya demokrasi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Hal ini dikarenakan Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya membekali individu dengan pengetahuan politik, tetapi juga mempersiapkan mereka untuk menjadi agen perubahan yang mampu mengambil peran strategis dalam pembangunan bangsa. Analisis kritis menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi pendekatan ini sangat bergantung pada sinergi antara pembelajaran formal di kelas, perkembangan teknologi, dan peran aktif pemuda milenial dalam menerapkan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan nyata.

Melalui Pendidikan Kewarganegaraan yang responsif terhadap dinamika sosial dan politik, pemuda milenial dapat lebih siap menghadapi tantangan global sekaligus memanfaatkan peluang yang ada untuk mendukung pembangunan bangsa. Selain itu, pendidikan kewarganegaraan dapat berfungsi sebagai alat yang efektif dalam membangkitkan kesadaran akan hak-hak politik yang dimiliki oleh warga negara, serta menyoroti pentingnya peran mereka dalam menjaga kualitas demokrasi. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan literasi politik tidak hanya berdampak pada pemilu sebagai momentum demokrasi, tetapi juga pada keberlanjutan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Peran pendidikan kewarganegaraan dalam mengenalkan nilai-nilai demokrasi, hak-hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara memiliki peran yang sentral dalam mendorong partisipasi aktif, kritis, dan konstruktif dalam proses politik. Dengan penekanan yang kuat pada pendidikan kewarganegaraan, diharapkan tercipta kesadaran yang lebih luas di kalangan pemuda milenial akan pentingnya peran serta mereka dalam membangun negara sesuai dengan tujuan bersama.

### **SIMPULAN**

Literasi politik merupakan elemen kunci yang mampu mendorong partisipasi aktif pemuda milenial dalam pemilihan umum. Penelitian ini menunjukkan bahwa rendahnya tingkat partisipasi politik generasi muda di Indonesia dapat diatasi dengan pendekatan yang strategis melalui Pendidikan Kewarganegaraan. Sebagai bagian integral dari sistem pendidikan, Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya berperan dalam membekali generasi muda dengan pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, tetapi juga mampu menginternalisasi nilai-nilai demokrasi secara komprehensif. Pemanfaatan teknologi dan literasi digital menjadi langkah penting dalam memperluas akses informasi politik yang valid serta membangun kemampuan berpikir kritis dalam mengevaluasi isu-isu politik. Selain itu, peran aktif pemuda dalam organisasi, komunitas, dan forum publik semakin memperkuat kesadaran kolektif terhadap pentingnya partisipasi politik yang inklusif dan berkelanjutan. Implementasi pendekatan variatif, seperti pembelajaran berbasis konstruktivisme, komunitas belajar, refleksi, dan penilaian sebenarnya, menjadi kunci dalam menciptakan pemilih yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab. Pendidikan Kewarganegaraan dengan pendekatan ini memiliki potensi untuk menciptakan sinergi antara pembelajaran formal di kelas, kemajuan teknologi, dan peran aktif generasi muda dalam membangun fondasi demokrasi yang kuat. Dengan demikian, penguatan

literasi politik melalui Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya meningkatkan partisipasi pemuda dalam pemilu, tetapi juga memperkuat nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Upaya ini diharapkan mampu mendukung terciptanya generasi yang tidak hanya sadar akan hak dan tanggung jawabnya, tetapi juga siap menjadi agen perubahan dalam mewujudkan Indonesia yang lebih inklusif dan demokratis.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi berarti dalam penelitian ini, baik dalam hal ide maupun dukungan finansial. Penghargaan istimewa disampaikan kepada Dr. Imam Syafi'i, S. Ag, M. Pd, M. Pd. I. sebagai pembimbing yang memberikan panduan yang sangat berharga dalam proses penelitian dan penyusunan artikel ini. Kontribusinya telah menjadi dasar yang penting dalam mengembangkan gagasan serta pemahaman yang mendalam dalam penelitian ini.

### DAFTAR PUSTAKA

- Andriyany, D. P. (2021). Analisis Konsep Produktivitas Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produktivitas Kerja Karyawan (Studi Literatur) [Doctoral dissertation]. STIE PGRI Dewantara.
- Arikunto, S. (2010). Metode Penelitian. Bumi Aksara.
- Astuti, S. I. (2019). Enhancing Active Citizenship and Political Literacy among Young Voters in High School. Proceedings of the Social and Humaniora Research Symposium (SoRes 2018). <https://doi.org/10.2991/sores-18.2019.72>
- Blais, A., & Dobrzynska, A. (1998). Turnout in Electoral Democracies. *European Journal of Political Research*, 33(2), 239–261. <https://doi.org/10.1111/1475-6765.00382>
- Bochel, H. (2009). Political literacy. The Higher Education Academy Network.
- Bowyer, B., & Kahne, J. (2020). The digital dimensions of civic education: Assessing the effects of learning opportunities. *Journal of Applied Developmental Psychology*, 69. <https://doi.org/10.1016/j.appdev.2020.101162>
- Bryant, J., & Oliver, M. B. (Eds.). (2009). *Media Effects*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203877111>
- Budiarjo, M. (1982). Partisipasi dan Partai Politik.
- Burhanuddin, R. J. (2022). Pandangan Ulama Kontemporer di Indonesia tentang Dana Talangan Haji dalam Perbankan Syariah [Doctoral Dissertation]. IAIN Parepare.
- Circle. (2021). Youth Electoral Significance Index (YESI). Tufts University.
- Downs, A. (1957). *An Economic Theory of Democracy*. Harper and Row.
- Finlay, A., Wray-Lake, L., & Flanagan, C. (2010). Civic Engagement during the Transition to Adulthood: Developmental Opportunities and Social Policies at a Critical Juncture. In *Handbook of Research on Civic Engagement in Youth*, 277–305. Wiley. <https://doi.org/10.1002/9780470767603.ch11>
- Galston, W. A. (2001). Political Knowledge, Political Engagement, and Civic Education. *Annual Review of Political Science*, 4(1), 217–234. <https://doi.org/10.1146/annurev.polisci.4.1.217>
- Guntoro, H. (2021). Metode Bimbingan Agama Orang Tua terhadap Akhlak Anak Menurut Terjemahan Kitab Al-Akhlak Li Al Banin Jilid 1-2 Karya Syaikh Umar Baraja [Skripsi]. Institut Agama Islam Negeri Kudus.
- Haris Zulkarnain, M., & Saufi, A. (2021). Urgensi Pendidikan Pemilih Muda Menuju Pemilihan Umum 2024 yang Berintegritas. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 3(2), 154–173. <https://doi.org/10.55108/jbk.v3i2.262>
- Hoskins, B., Villalba, G. E., Van, N. D., & Barber, C. (2008). Measuring Civic Competence in Europe: a Composite Indicator Based on IEA Civic Education Study 1999 for 14 Years Old in School. Luxembourg.
- Hutter, K. (2008). Young People's Civic Engagement in East Asia and the Pacific. UNICEF EARPRO.
- Jennings, M. K., Stoker, L., & Bowers, J. (2009). Politics across Generations: Family Transmission Reexamined. *The Journal of Politics*, 71(3), 782–799. <https://doi.org/10.1017/S0022381609090719>
- Jost, J. T., & Kay, A. C. (2010). Social Justice: History, Theory, and Research. In *Handbook of Social Psychology*. Wiley. <https://doi.org/10.1002/9780470561119.socpsy002030>
- Kahne, J., & Westheimer, J. (2006). The Limits of Political Efficacy: Educating Citizens for a Democratic Society. *PS: Political Science & Politics*, 39(2), 289–296. <https://doi.org/10.1017/S1049096506060471>
- Kariuki, P., Khambule, I., Ofusori, L. O., & Mkhize, M. (2021). Youth Participation in Electoral Politics in South Africa: Trends, Patterns and Patterns. Democracy Development Program (DDP).
- Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo). (2023, August 30). Targetkan Pemilih Muda, Kominfo Sosialisasikan Pemilihan Serentak 2024. Kominfo.
- Kirchoff, J. (2017). Using Digital Comics to Develop Digital Literacy: Fostering Functionally, Critically, and Rhetorically Literate Students. *Texas Journal of Literacy Education*, 5(2), 117–129.

- Komisi Pemilihan Umum (KPU). (2019, December 19). Hasil Hitung Suara Pemilu Presiden & Wakil Presiden Ri 2019. Komisi Pemilihan Umum.
- Komisi Pemilihan Umum (KPU). (2023). Informasi Seputar Pemilihan Umum 2024. Komisi Pemilihan Umum.
- Kymlicka, W., & Norman, W. (2000). Citizenship in Culturally Diverse Societies: Issues, Contexts, Concepts. In *Citizenship in Diverse Societies*, 1-42. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/019829770X.003.0001>
- Napitupulu, H. N. M., & Sagala, A. I. (2019). Pengaruh Pendidikan Kewarganegaraan Terhadap Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pemilihan Umum (Studi Kasus: Pemilu Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018). *Civic-Culture: Jurnal Ilmu Pendidikan PKn Dan Sosial Budaya*, 3(1), 185-198.
- Nassa, D. Y. (2024). Mewujudkan Generasi Melek Politik Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Menyongsong Indonesia Emas 2045. *WASIS: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 5(2), 130-142. <https://doi.org/10.24176/wasis.v5i2.12818>
- Neundorf, A., Smets, K., & García-Albacete, G. M. (2013). Homemade citizens: The development of political interest during adolescence and young adulthood. *Acta Politica*, 48(1), 92-116. <https://doi.org/10.1057/ap.2012.23>
- Norris, P. (2011). *Democratic Deficit*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511973383>
- Pahlevi, Moch. E. T., Khalyubi, W., & Khatami, M. I. (2021). Persepsi Pemilih Milenial Dalam Pemilu Serentak 2019 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 2(2), 99-114. <https://doi.org/10.55108/jap.v2i2.11>
- Pemerintah Indonesia. (2017). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Lembaran RI. Sekretariat Negara.
- Print, M., Ørnstrøm, S., & Skovgaard Nielsen, H. (2002). Education for Democratic Processes in Schools and Classrooms. *European Journal of Education*, 37(2), 193-210. <https://doi.org/10.1111/1467-3435.00102>
- Priwati, A. R., Barus, D. K., Yusuf, S. K. D., Raditya, D. G. N., & Mahambara, R. (2020). *Riset - Riset Cyberpsychology*. Zahir Publishing.
- Proffitt, J. (2014). *Millennial Issues and Millennial V Millennial Issues and Millennial Voters: The Opinions of T otters: The Opinions of Today's Youth*. Eastern Illinois University.
- Quintelier, E. (2010). The effect of schools on political participation: a multilevel logistic analysis. *Research Papers in Education*, 25(2), 137-154. <https://doi.org/10.1080/02671520802524810>
- Subdirektorat Statistik Politik Keamanan. (2019). *Statistik Politik 2019*. Badan Pusat Statistik.
- Sutisna, A. (2017). Strategi Peningkatan Literasi Politik Pemilih Pemula melalui Pendekatan Pembelajaran Kontekstual. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 6(2), 135-146.
- The Global State of Democracy 2021: Building resilience in a pandemic era. (2021). International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA). <https://doi.org/10.31752/idea.2021.91>
- Tolo, K. W. (1999). *The Civic Education of American Youth: From State Policies to School District Practices*. Univ Texas at Austin Lyndon B.
- Torney-Purta, J., Rainer Lehmann, Hans Oswald, & Wolfram Schulz. (2001). *Citizenship and education. The International Association for the Evaluation of Educational Achievement*.
- Ubaedillah, A. (2016). *Pendidikan Kewarganegaraan Pancasila, Demokrasi dan Pencegahan Korupsi*. Prenada Media.
- Walker, J. L. (2015). The Foundations of Democracy. *The American Journal of Economics and Sociology*, 23(1), 19-36.
- Widiatmaka, P., Purwoko, A. A., Anggara, O., & Lubis, P. H. (2022). Peran Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Multikultural dalam Menanggulangi Radikalisme. *CivicEdu: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 5(2), 68-75.
- Worldometers. (2023). *Current World Population*. Worldometers.
- Yuliandari, E., Muchtarom, Moh., & Widiatmaka, P. (2023). Pendidikan Politik melalui Penguatan Literasi Digital dalam Proses Pembelajaran Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. *Kwangsan: Jurnal Teknologi Pendidikan*, 11(1), 186. <https://doi.org/10.31800/jtp.kw.v11n1.p186--205>
- Yuniarto, B. (2020). Membangun Kesadaran Demokrasi melalui Pendekatan Kontekstual pada Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. *EDUEKSOS: Jurnal Pendidikan Sosial Dan Ekonomi*, 9(1), 56-72.